



Pemerintah Kabupaten Bone  
Dinas Perikanan

# **RENCANA KERJA 2022**

**DINAS PERIKANAN KABUPATEN BONE**



**BUPATI BONE**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BONE**  
**NOMOR 48 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH**  
**KABUPATEN BONE TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BONE,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022 yang terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan serta memberi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022, maka diperlukan Dokumen Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 5);
17. Peraturan Bupati Bone Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone tahun 2020 Nomor 60);
18. Peraturan Bupati Bone Nomor 34 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 34).

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2022.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan wilayah pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
6. Perencanaan pembangunan adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilhan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk priode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk priode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## **Pasal 2**

Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan selama 1 (satu) tahun, dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, dan Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahunberjalan.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 3**

Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 disusun dengan maksud:

- a. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2022;
- b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2022; dan
- c. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2022.

## **BAB III SISTEMATIKA PENULISAN**

### **Pasal 4**

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan;  
Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;  
Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;  
Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;  
Bab V : Penutup.

- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas:

Lampiran I : Dinas Pendidikan  
Lampiran II : Dinas Kesehatan



Lampiran III	: BLUD RSUD Tenriawaru
Lampiran IV	: Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
Lampiran V	: Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
Lampiran VI	: Satuan Polisi Pamong Praja
Lampiran VII	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Lampiran VIII	: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Lampiran IX	: Dinas Sosial
Lampiran X	: Dinas Ketenagakerjaan
Lampiran XI	: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Lampiran XII	: Dinas Ketahanan Pangan
Lampiran XIII	: Dinas Lingkungan Hidup
Lampiran XIV	: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Lampiran XV	: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Lampiran XVI	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Lampiran XVII	: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Lampiran XVIII	: Dinas Perhubungan
Lampiran XIX	: Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Lampiran XX	: Dinas Koperasi
Lampiran XXI	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu
Lampiran XXII	: Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Lampiran XXIII	: Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik
Lampiran XXIV	: Dinas Kebudayaan
Lampiran XXV	: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Lampiran XXVI	: Dinas Pariwisata
Lampiran XXVII	: Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Lampiran XXVIII	: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Lampiran XXIX	: Dinas Perindustrian
Lampiran XXX	: Dinas Perdagangan
Lampiran XXXI	: Dinas Perikanan
Lampiran XXXII	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Lampiran XXXIII	: Badan Keuangan dan Aset Daerah
Lampiran XXXIV	: Badan Pendapatan Daerah
Lampiran XXXV	: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Lampiran XXXVI	: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Lampiran XXXVII	: Inspektorat Daerah
Lampiran XXXVIII	: Sekretariat DPRD
Lampiran XXXIX	: Sekretariat Daerah

Lampiran XL	: Kecamatan Lamuru
Lampiran XLI	: Kecamatan Dua Boccoe
Lampiran XLII	: Kecamatan Sibulue
Lampiran XLIII	: Kecamatan Barebbo
Lampiran XLIV	: Kecamatan Cina
Lampiran XLV	: Kecamatan Mare
Lampiran XLVI	: Kecamatan Awangpone
Lampiran XLVII	: Kecamatan Tellu Siattinge
Lampiran XLVIII	: Kecamatan Cenrana
Lampiran XLIX	: Kecamatan Ajangale
Lampiran L	: Kecamatan Amali
Lampiran LI	: Kecamatan Palakka
Lampiran LII	: Kecamatan Ulaweng
Lampiran LIII	: Kecamatan Bengo
Lampiran LIV	: Kecamatan Tellu Limpoe
Lampiran LV	: Kecamatan Lappariaja
Lampiran LVI	: Kecamatan Patimpeng
Lampiran LVII	: Kecamatan Ponre
Lampiran LVIII	: Kecamatan Libureng
Lampiran LIX	: Kecamatan Bontocani
Lampiran LX	: Kecamatan Kahu
Lampiran LXI	: Kecamatan Kajuara
Lampiran LXII	: Kecamatan Tonra
Lampiran LXIII	: Kecamatan Salomekko
Lampiran LXIV	: Kecamatan Tanete Riattang
Lampiran LXV	: Kecamatan Tanete Riattang Barat
Lampiran LXVI	: Kecamatan Tanete Riattang Timur

## **Pasal 5**

- (1) Dalam rangka menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2022, Perangkat Daerah menggunakan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 sebagai rujukan penyusunan program dan kegiatan.
- (2) Perangkat Daerah menggunakan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## **Pasal 6**

Bappeda menelaah kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dengan RKPD Tahun 2022.



#### **Pasal 7**

Isi beserta uraian Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **BAB IV PENUTUP**

#### **Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal 29 Juli 2021

**BUPATI BONE,**

  
**A. FAHSAR M. PADJALANGI**

Diundangkan di Watampone  
pada tanggal 29 Juli 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE**

  
**ANDI ISLAMUDDIN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2021 NOMOR 48**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah Nya kepada kami, sehingga kami dapat menyusun Rencana Kerja ( RENJA ) Dinas Perikanan Tahun Anggaran 2022

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat tentang Kebijakan, Program dan Kegiatan. Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2022 selain berisi tentang tujuan, sasaran, program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan sumber dana / pembiayaan juga memuat tentang evaluasi kinerja tahun sebelumnya (Tahun 2020).

Tersusunnya Rencana Kerja Dinas Perikanan Tahun 2022 ini, disamping sebagai dokumen Rencana Kerja juga diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam menyusun rencana kegiatan tahunan sehingga terdapat arah yang jelas dari program/kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan. Kami menyadari bahwa penyusunan RENJA ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan Rencana Kerja Tahun 2022 ini, kepada semua pihak yang membantu penyusunan Rencana Kerja ini kami ucapkan terima kasih semoga Tuhan yang Maha Esa memberkati dan melimpahkan Rahmat-Nya kepada kita semua, Aamiin.

Watampone, 21 Juli 2021



Kepala Dinas Perikanan  
Kabupaten Bone,

**Ir. BAHARUDDIN, M.Si.**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. : 19631231 198903 1 175

# DAFTAR ISI

	HALAMAN
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
A. BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan .....	6
B. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD .....	12
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Bone Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Bone .....	12
2.1 Analisis Kinerja Pelayanan OPD .....	13
C. BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .....	19
A Tujuan .....	19
B Sasaran .....	21
C Strategi .....	22
D Kebijakan .....	22
E Program .....	23
F Kegiatan.....	24
D. BAB IV PENUTUP .....	28
LAMPIRAN	

# LAMPIRAN

## **BAB I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja SKPD adalah Dokumen Perencanaan untuk periode 1 (satu) Tahun yang memuat Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renja SKPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi yang dipersyaratkan untuk mengarahkan Program dan Kegiatan pelayanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya. Rencana Kerja OPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena Renja merupakan produk perencanaan pada unit organisasi Pemerintah terendah dan terkecil. Renja OPD berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kualitas penyusunan Renja OPD sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan publik.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Bone merupakan penjabaran Tahunan dari Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Perikanan serta Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone yang telah disusun.

Program dan Kegiatan yang berkaitan dengan Kelautan dan Perikanan perlu direncanakan dengan cermat agar dapat bersinergi dengan program pembangunan lainnya secara berkesinambungan, berwawasan lingkungan, dan berbasis masyarakat. Dengan demikian, penyelenggaraan Program Kelautan dan Perikanan harus dimantapkan secara berkelanjutan melalui integrasi dan koordinasi yang terus menerus.

Semangat untuk menghasilkan kemajuan di bidang Kelautan dan Perikanan didorong oleh motivasi yang kuat untuk menggali dan memanfaatkan potensi Perikanan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. Dinas Kelautan dan Perikanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diberi wewenang untuk mengelola, memanfaatkan, dan melestarikan sumber daya Kelautan dan Perikanan demi kesejahteraan masyarakat Bone, khususnya masyarakat nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasaran ikan, serta untuk meningkatkan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bone, dimana Dinas Perikanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Kelautan dan Perikanan berubah nomenklatur menjadi Dinas Perikanan menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan Kabupaten / Kota untuk urusan bidang kelautan dan perikanan. Dinas Perikanan sebagaimana diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah, dengan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang perikanan;
- b. pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang perikanan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan Bidang perikanan;



- d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Permasalahan yang teridentifikasi dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Bone yaitu belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya kelautan (perikanan tangkap baru dimanfaatkan sebesar 60% dari potensi lestarnya, potensi budidaya rumput laut di pantai barat dan potensi lahan tambak baru dimanfaatkan 80%).

Permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan pelayanan sektor Kelautan dan perikanan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Lemahnya kemampuan pelaku usaha dibidang kenelayanan dalam kemandirian berwirausaha.
2. Masih rendahnya kemampuan berwirausaha bagi pembudidaya ikan secara berkelanjutan.
3. Rendahnya legalitas berusaha bagi usaha perikanan.

## 1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2022 disusun berdasarkan Pancasila sebagai landasan idiil, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional, dan ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN 1999-2004 sebagai landasan operasional. Selain itu penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2022 berpedoman pada dasar hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  4. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028;
  5. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 – 2029;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 07 Tahun 2008 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bone Tahun 2005-2025;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012 – 2032.

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013-2018 .
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bone.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 (Lembaran daerah No.2 Tahun 2021);
12. Peraturan Bupati Bone Nomor 76 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 76).
13. Peraturan Bupati Bone Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 (Peraturan Daerah Nomor.4 Tahun 2021).

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2022 ini merupakan salah satu dari rangkaian proses pekerjaan penyusunan program pembangunan daerah. Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2022 ini berisikan uraian mengenai evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan tahun lalu dan rencana kinerja tahun yang akan datang.

Berdasarkan hal diatas, maka Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2022 ini disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Penjabaran Tahunan dari Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Perikanan Kabupaten Bone yang telah disusun.
2. Mengukur dan melakukan evaluasi kinerja SKPD Dinas Perikanan Kabupaten Bone.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum Dinas Perikanan Kabupaten Bone sekaligus memahami tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Perikanan Kabupaten Bone.
4. Memudahkan seluruh jajaran Aparatur pemda untuk memahami dan menilai sasaran, kebijakan dan Program serta kegiatan operasional Dinas Perikanan Kabupaten Bone.
5. Sebagai pedoman dan acuan dalam melaksanakan kegiatan pada tahun 2022 agar dapat dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2022 disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

## KATA PENGANTAR

## DAFTAR ISI

## BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik

### 1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra RKPD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi /Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

### 1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

## BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya

pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu, dan realisasi Renstra OPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan OPD dan/atau realisasi APBD untuk OPD yang bersangkutan.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika OPD yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap OPD perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan OPD yang bersangkutan.

## 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD;



3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Developmnet Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

#### 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

- 1.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari hasil Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan ataupun berdasarkan penelitian langsung yang dilakukan oleh OPD bersangkutan.

Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD.

---

### BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

#### 3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD

#### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD

#### 3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Misal:

- Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
- Pencapaian MDGs,
- Pengentasan kemiskinan,
- Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
- Dsb.

- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

- Jumlah program dan jumlah kegiatan.
- Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

#### BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama OPD dan nama dan tanda tangan kepala OPD, serta cap OPD yang bersangkutan.

#### LAMPIRAN RENJA

Pada bagian lampiran dapat dilihat pada tabel rumusan rencana program dan kegiatan OPD

## **BAB II.**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Bone Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Bone.

Selama tahun 2020 pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada program-program Dinas Perikanan Kabupaten Bone umumnya sudah berjalan dengan baik dan dapat memenuhi target kinerja, Hal tersebut dapat tercapai karena merupakan kerja keras dan kerja sama dari semua pihak yang terlibat dalam berbagai kegiatan tersebut.

Penyelesaian kegiatan tahun 2020 mengoptimalkan sumber daya yang ada serta berkoordinasi dengan instansi yang relevan dalam hal penyesuaian Anggaran Kas, Sehingga diharapkan dapat terjadi peningkatan mutu layanan dan realisasi proyeksi capaian kinerja pelayanan dan anggaran akan tercapai. Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Dinas Perikanan Kabupaten Bone dapat dilihat pada Tabel 1 pada BAB LAMPIRAN.

Program Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2020 bersumber dari Dana APBD (DAK dan DAU) terdiri dari 9 Program dan 35 Kegiatan dengan Total Anggaran sebesar Rp. 4.719.405.300,- dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 4.694.115.807,- atau 99,46 % dengan realisasi fisik 100%. Target Pendapatan (PAD) Tahun 2020 sebesar Rp. 125.000.000, dengan capaian realisasi sebesar Rp. 125.350.600 atau 100,3 %.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2020 yang bersumber dari APBD dapat dilihat pada Tabel 2.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Pada tahun 2020 terdapat beberapa kendala terkait teknis pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Bone yang diuraikan sebagai berikut :

- 1) Alokasi kebutuhan anggaran kegiatan pada Dinas Perikanan tidak mengakomodir semua kebutuhan sesuai yang direncanakan sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi seperti pada Kegiatan Pembinaan Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap yaitu Paket Pemberian Bantuan Sarana dan Prasarana Untuk Peningkatan Produksi Tangkapan Ikan masih kurang karena pagu anggaran yang disediakan kurang mencukupi untuk pelaksanaannya sehingga target pada RPJMD dan Renstra tidak tercapai;
- 2) Pengelolaan sumberdaya perikanan yang belum optimal diakibatkan oleh skala usaha bersifat tradisional dan pemanfaatan teknologi pengelolaan perikanan tepat guna dan ramah lingkungan yang masih rendah;
- 3) Terdapat potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang belum digali secara maksimal misalnya Penerapan teknologi budidaya Rumput Laut *Eucheuma cottonii* dan Penerapan Teknologi Budidaya Udang dan bandeng dengan Metode CBIB.

Tindak lanjut pemecahan masalah dalam rangka peningkatan kinerja Pelayanan OPD Dinas Perikanan Kabupaten Bone yang perlu dilakukan antara lain sebagai berikut :

- Melakukan perencanaan dengan memperhatikan prioritas utama program dan kebutuhan pembangunan bidang perikanan dan kelautan.
- Mengusulkan penambahan aparatur untuk meningkatkan kinerja organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan antara lain staf pengelola

kegiatan dan petugas teknis lapangan. Selain itu perlu dilakukan penekanan tugas dan fungsi aparaturnya dalam rangka peningkatan kinerja organisasi.

- Pembinaan, pelatihan dan sosialisasi tentang teknis dan peningkatan usaha kelautan dan perikanan.
- Perlunya dilakukan penerapan hasil dari perencanaan zonasi Kelautan dan Perikanan yang telah dibuat oleh Dinas Perikanan Kabupaten Bone guna memaksimalkan potensi Kelautan dan Perikanan yang belum termanfaatkan.
- Pada tahun 2021 dan tahun selanjutnya akan dilakukan penganggaran kembali sesuai dengan rencana kebutuhan berdasarkan skala prioritas.

Analisis Program menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan pelayanan kinerja SKPD tahun 2020 dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Perikanan Tangkap dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Peisir

Pelaksanaan Program tersebut dimaksudkan untuk mendukung dan menunjang indikator sasaran strategis yaitu Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dan Jumlah Kelompok Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang terberdayakan (KUB). Program tersebut terdiri atas pembinaan kelompok (KUB) , pemberian bantuan seperti alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan dan Sosialisasi dan pembinaan ke kelompok tentang cara penangkapan ikan dengan menggunakan peralatan yang modern sampai penanganan ikan diatas kapal sampai tiba di darat kembali. Hal ini sangat berpengaruh terhadap peningkatan produksi sehingga linear dengan pendapatan



nelayan. Keberhasilan/kegagalan dari program ini sangat dipengaruhi oleh alokasi anggaran baik dari APBD Kabupaten, DAK, APBD Propinsi maupun dari APBN. Selain dari dukungan anggaran dari pemerintah peran Sumberdaya dari Dinas Perikanan kabupaten Bone dan kerjasama dengan kelompok sangat perlukan sebagai mitra dan pendamping untuk mencapai sasaran tersebut.

## 2. Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Pelaksanaan program ini dimaksudkan untuk menunjang dan mendukung indikator sasaran strategis yaitu peningkatan produksi perikanan budidaya dan Jumlah Kelompok Pembudidaya yang mendapat Sarana dan Prasarana Produksi Budidaya (Pokdakan). Program tersebut terdiri atas pemberian bantuan sarana dan prasarana produksi budidaya, pembinaan kelompok, sosialisasi tentang cara berbudidaya yang dengan menerapkan Cara budidaya Ikan yang baik (CBIB). Pemanfaatan lokasi untuk lahan budidaya serta peluang jenis budidaya sehingga peningkatan produksi budidaya semakin tinggi dan tingkat kesejahteraan pembudidaya juga meningkat. Keberhasilan/kegagalan dari program ini sangat dipengaruhi oleh alokasi anggaran baik dari APBD Kabupaten, DAK, APBD Propinsi maupun dari APBN. Selain dari dukungan anggaran dari pemerintah peran Sumberdaya dari Dinas Perikanan kabupaten Bone dan kerjasama dengan kelompok sangat perlukan sebagai mitra dan pendamping untuk mencapai sasaran tersebut.

### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

- a. Masih tingginya penduduk miskin di wilayah pesisir.

- b. Rendahnya pelaku kegiatan usaha kelautan dan perikanan (KUKP) untuk mengakses permodalan (kredit program).
- c. Masih banyaknya nelayan yang masih tergantung pada tengkulak.
- d. Nelayan belum memahami pentingnya berkelompok dalam pengelolaan usahanya.
- e. Terjadinya sengketa pemanfaatan ruang pengelolaan wilayah pesisir.
- f. Tingginya illegal fishing.
- g. Masih rendahnya peran masyarakat dalam pengendalian sumberdaya kelautan.
- h. Menurunan produksi rumput laut gracilaria disebabkan harga yang menurun.
- i. Menurunnya produksi udang windu disebabkan penyakit.
- j. Menurunnya produksi kepiting bakau disebabkan peningkatan kerusakan habitat mangrove.
- k. Terbatasnya sarana produksi perikanan budidaya.
- l. Kondisi tambak yang masih jauh dari standar cara budidaya ikan yang baik (CBIB).
- m. Penerapan teknologi pengolahan pasca panen masih rendah.
- n. Produksi perikanan tangkap menurun dipengaruhi oleh perubahan iklim, kerusakan habitat terumbu karang dan mangrove.
- o. Penerapan teknologi pengolahan pasca panen pada perikanan tangkap masih rendah.
- p. Rendahnya kesadaran nelayan dalam memenuhi perijinan kapal penangkapan ikan.
- q. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam memahami standar penanganan ikan di atas kapal.

- r. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kualitas mutu ikan di PPI.
- s. Rendahnya penggunaan sarana API dan ABPI yang ramah lingkungan.
- t. Rendahnya koordinasi antar lembaga BP4K dengan Dinas Kelautan dan perikanan.
- u. Masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang penyuluhan perikanan.
- v. Rendahnya laporan binaan kelompok dengan rasio penyuluh.
- w. Masih rendahnya pengolahan hasil perikanan dari bahan baku menjadi barang jadi (produk).
- x. Jumlah kelompok pengolah dan pemasar ikan (Poklahsar) masih kurang.
- y. Masih rendahnya penerapan teknologi dalam mengolah hasil perikanan.
- z. Kurangnya pengolah ikan yang memiliki ijin depkes.
- aa. Rendahnya penggunaan alat pemasaran yang higienis.
- bb. Belum optimalnya pelayanan administrasi perkantoran.
- cc. Masih terbatasnya sarana dan prasarana perkantoran
- dd. Masih rendahnya kapasitas sumberdaya aparatur dalam menjalankan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- ee. Belum optimalnya pelaporan capaian kinerja dan keuangan dan statistik Dinas Kelautan dan Perikanan

#### 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat baik berasal dari usulan musrenbang maupun proposal yang diajukan oleh Kelompok akan menjadi acuan dalam menentukan kebijakan dalam perencanaan Tahun yang akan datang.

Usulan Program dan kegiatan masyarakat yang berasal dari usulan musrenbang dan usulan proposal kelompok dapat dilihat pada LAMPIRAN.

**BAB III.****TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

Sebagaimana telah diketahui bupati dan wakil bupati terpilih telah mencanangkan visi dan misi serta program strategi yang akan dilakukan selama masa pemerintahan 5 tahun kedepan adalah :

Visi jangka menengah Kabupaten Bone tahun 2018 – 2023 yaitu :

” Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera ”

Dalam rangka mencapai visi jangka menengah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 visi yang ditempuh sebagai berikut :

Misi 1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas korupsi, Kolusi dan nepotisme ( KKN )

Misi 2. Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Misi 3. Meningkatkan akses pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya.

Misi 4. Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan pedesaan.

Misi 5. Mendorong percepatan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik.

Misi 6. Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.

Berdasarkan Visi dan Misi jangka menengah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 tersebut , sektor Kelautan dan Perikanan akan berkontribusi pada pencapaian Misi 2 : mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat dan Misi 5 : Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk mengembangkan usaha

dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik,

## **A. TUJUAN**

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi yang menunjukkan apa yang akan dihasilkan dalam kurun waktu periode perencanaan, dalam hal ini untuk jangka waktu lima tahun (2018 – 2023).

Tujuan Pembangunan Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut :

Tujuan Pembangunan Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

### **1. Meningkatkan Produksi Perikanan**

Sektor perikanan menjadi salah sektor yang menopang perekonomian Kabupaten Bone selain sektor pertanian dan kehutanan. Data BPS tahun 2020 menunjukkan, sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan berkontribusi sangat signifikan yakni 47,07 % terhadap PDRB Kabupaten Bone atau hampir separuh PDRB Kabupaten Bone disumbangkan oleh ketiga sektor tersebut. Pada tahun yang sama, perekonomian Kabupaten Bone tumbuh -0,25 %, atau lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 2,07 % pada tahun 2020.

### **2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja urusan kelautan dan perikanan**

Akuntabilitas kinerja menjadi hal yang sangat penting mengingat paradigma tentang tata kelola pemerintahan yang sudah berubah menuju birokrasi yang efektif dan efisien untuk menjamin mutu pelayanan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

## **B. SASARAN**

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Berdasarkan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023, sasaran Pembangunan Kelautan dan perikanan dalam mencapai visi dan misi sebagai berikut :

### **1. Meningkatnya Produksi Perikanan**

Produksi perikanan menjadi sasaran utama pembangunan sektor kelautan dan perikanan baik produksi perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Peningkatan produksi perikanan diharapkan dapat menggerakkan perekonomian daerah dan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### **2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan**

Salah satu pilar pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah akuntabilitas. Dinas Perikanan Kabupaten Bone selaku perangkat daerah yang mempunyai mandat untuk menjalankan urusan kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota memiliki tanggung jawab yang besar untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bone pada sektor kelautan dan perikanan.

### **C. STRATEGI**

Strategi dan arah kebijakan Dinas Perikanan Kabupaten Bone tahun 2018 – 2023 dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas SDM nelayan, pembudidaya ikan, Pengolah dan Pemasar, kapasitas kelembagaan kelompok dan pola kemitraan pelaku usaha perikanan melalui pengembangan sarana dan prasarana usaha perikanan dan rekomendasi
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas dokumen perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah melalui pemenuhan layanan serta sarana dan prasarana pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran

### **D. KEBIJAKAN**

Arah kebijakan Dinas Perikanan Kabupaten Bone tahun 2018 – 2023 dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

1. Penyajian Data dan Informasi sektor Perikanan serta Peningkatan pengetahuan, keterampilan dan penguasaan teknologi pelaku usaha perikanan.
2. Peningkatan sarana dan prasarana usaha penangkapan, pembudidayaan ikan dan Pengolah pemasar.
3. Penguatan kapasitas kelembagaan pelaku usaha perikanan.
4. Penguatan dan fasilitasi pelaku usaha perikanan dalam mengakses permodalan dan Perlindungan diri
5. Peningkatan pelayanan UPT TPI dan UPT BBIPB



6. Memberikan Kecakupan Pemenuhan Jasa Komunikasi, Listrik dan Air untuk mendukung admintrasi perkantoran
7. Melakukan kecukupan bahan, jasa dan alat kelengkapan perkantoran
8. Melakukan pelayanan admintrasi keuangan dan perkantoran yang trasparansi dan akuntabel
9. Mendorong pengadaan Mutu Sarana dan Prasarana Pendukung Perkantoran
10. Mendorong kemampuan sumber daya manusia aparatur
12. Memberikan informasi kinerja SMART
13. Melalukan Penyusunan Perencanaan, Publikasi penyelenggaran OPD dan Promosi Produk Perikanan

#### **E. PROGRAM**

Program adalah instrumen kebijakan yang terdiri dari satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Statistik. Program Dinas Perikanan Kabupaten Bone melalui dana DAU + DAK pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

##### **1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**

KABUPATEN/KOTA

##### **2. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**

##### **3. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**

##### **4. PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**

**F. KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN**

Kegiatan adalah penjabaran dari program. Jumlah kegiatan pada Dinas Perikanan Kabupaten Bone melalui dana DAK + DAU pada Tahun 2022 sebanyak **15 (Lima Belas)** kegiatan yaitu :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
9. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
10. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
11. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
12. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
13. Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Mikro dan Kecil
14. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
15. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten Kota

Sedangkan jumlah sub kegiatan pada Tahun 2022 berdasarkan Nomor : 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi,

Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terdiri dari 36 ( **Tiga Puluh Enam** ) sub kegiatan, yaitu :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Aparatur
5. Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya
6. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
7. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
9. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
10. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
11. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
12. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
13. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
14. Pengadaan Mebel
15. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
16. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
17. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
18. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
19. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
20. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

21. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya
22. Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
23. Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha
24. Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
25. Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
26. Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil
27. Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil
28. Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha
29. Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
30. Penyediaan Data Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 Daerah Kabupaten /Kota
31. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
32. Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat
33. Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat
34. Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan pengolahan Hasil Perikanan Dalam 1 (Satu) daerah Kabupaten/Kota
35. Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
36. Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan kecil dalam 1 ( Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Adapun Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja Dan Pagu Indikatif Tahun 2022 Dan Prakiraan Maju Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.1.

**BAB IV.****PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2022 merupakan salah satu indikasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bone yang dituangkan dalam bentuk Program dan Kegiatan untuk dijadikan acuan dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2022. Rencana Kerja ini disusun dan dibuat berdasarkan mekanisme yang ada yaitu atas masukan dan hasil penjangkaran dari berbagai pihak yang terkait.

Untuk itu keikutsertaan Stake Holder (Pemerintah, Masyarakat dan Swasta) terhadap pelaksanaan Program dan Kegiatan sebagaimana tersebut di atas, sangat menentukan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Bone khususnya pembangunan Kelautan dan Perikanan.

Hasil kinerja Renja OPD Dinas Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2022 ini akan menjadi dasar evaluasi tingkat pencapaian serta keberhasilan untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam menyusun Renja OPD tahun berikutnya sehingga kinerja OPD dapat terukur dan berkesinambungan. Keberhasilan Rencana Kerja ini sangat tergantung dengan penyediaan Dana baik yang bersumber dari APBD maupun APBN.

Tabel 1. Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Bone

No.	Indikator	SPM/standar Nasional	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi	
				(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	<b>Pertumbuhan PDRB sub sektor Perikanan (%)</b>					-	10.0			-	10.0
	<b>Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap (%)</b>					6.0	6.0			6.0	6.0
	<b>Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya (%)</b>					7.0	7.0			7.0	7.0
	<b>Pertumbuhan Produksi Olahan Hasil Perikanan (%)</b>					-	2.0			-	2.0
1	<b>Produksi Perikanan Tangkap (Ton)</b>			-	-	52,580.7	55,735.6			54,044.7	55,735.6
2	<b>Persentase) Jumlah Nelayan Kecil yang diberdayakan dalam Daerah Kabupaten/ kota (%)</b>			-	-	100.00	100.00			-	100.00
			Jumlah nelayan yang terlatih/dibina (Orang)	-	-	30.0	30.0			30.0	30.0
			Jumlah data dan informasi sumberdaya ikan (dokumen)	-	-	-	1.0			-	1.0

(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			Jumlah kelompok nelayan yang terbina dan terfasilitasi (KUB)	-	-	250.0	-			35.0	-
			Jumlah KUB yang memperoleh bantuan pemerintah(KUB)	-	-	6.0	-			14.0	-
			Jumlah Nelayan /Kelompok Nelayan yang terfasilitasi dengan Mitra ( orang )	-	-	150.0	160.0			150.0	160.0
			Jumlah Rumah Tangga Nelayan yang melakukan Diversifikasi Usaha (RTP)	-	-	113.0	113.0			113.0	113.0
<b>6</b>	<b>Persentase Jumlah Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (%)</b>			-	-	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>			<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
			Jumlah Unit Layanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (Unit)	-	-	1.0	1.0			1.0	1.0
			Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang Operasional (%)	-	-	100.0	100.0			100.0	100.0
	<b>Persentase Kelompok Nelayan yang memperoleh bantuan pemerintah (%)</b>					-	<b>100.0</b>				<b>100.0</b>



(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			Jumlah kelompok nelayan yang terbina dan terfasilitasi (KUB)			-	252.0				252.0
			Jumlah kelompok nelayan yang memperoleh bantuan pemerintah(KUB)			-	4.0				4.0
<b>7</b>	<b>Persentase Penerbitan tanda Daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT di wilayah sungai, danau waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 Daerah kabupaten/ kota (%)</b>			-	-	<b>100.0</b>	-			<b>100.0</b>	-
			Jumlah dokumen pelayanan penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan berukuran sampai dengan 10 GT (rekomendasi)	-	-	300.0	-			125.0	-
<b>8</b>	<b>Produksi Perikanan Budidaya ( Ton)</b>			-	-	<b>421,225</b>	<b>450,711</b>			<b>434,158</b>	<b>450,711</b>

(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
10	<b>Persentase Cakupan Pembudidaya Ikan Air Tawar yang diberdayakan dalam Daerah Kabupaten/ kota (Orang)</b>			-	-	-	100.0			-	100.0
11	<b>Persentase Cakupan Pokdakan Pembudidaya Ikan yang diberdayakan (Pokdakan)</b>			-	-	100.0	-			100.0	-
			Jumlah Data dan informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan Air Tawar (Laporan)	-	-	-	1.0			1.0	1.0
			Jumlah Pembudidaya Ikan air tawar yang terlatih dan terfasilitasi (Orang)	-	-	-	30.0			30.0	30.0
			Jumlah Pembudidaya Ikan yang terlatih dan terfasilitasi (Orang)	-	-	30.0	-			30.0	-
			Jumlah Pokdakan yang memperoleh Pendampingan/Penguatan Kelembagaan (Pokdakan)	-	-	10.0	-			32.0	-
			Jumlah Pembudidaya ikan Air Tawar yang terfasilitasi dengan mitra (orang)	-	-	-	100.0			-	100.0

(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			Jumlah Pembudidaya Ikan yang terfasilitasi dengan mitra (Orang)	-	-	30.0	-			-	-
<b>9</b>	<b>Persentase Penerbitan ijin usaha perikanan dibidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 Daerah Kab/Kota (%)</b>			-	-	<b>100.0</b>				<b>100.0</b>	
			Jumlah dokumen Pelayanan penerbitan ijin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya, lokasi dan atau manfaat atau dampak negatifnya dalam 1 Daerah Kabupaten/ Kota yang menggunakan teknologi semi insentif dan insentif serta tidak menggunakan modal asing atau tenaga kerja asing (Rekomendasi)	-	-	2.0				3.0	

(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
12	<b>Persentase Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 Daerah Kabupaten/ Kota (%)</b>			-	-	100.0	-			100.0	-
			Jumlah rekomendasi penerbitan tanda daftar pembudidayaan ikan kecil (rekomendasi)	-	-	50.0	-			15.0	-

13	<b>Persentase Pembudidaya Ikan Air Tawar yang memperoleh bantuan pemerintah (%)</b>			-	-	-	100.0			-	100.0
			Jumlah kelompok pembudidaya ikan Air Tawar yang terbina dan terfasilitasi (Pokdakan)	-	-	-	104.0			5.0	104.0
			Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan per tahun (Orang)	-	-		10.0			582,000	10.0
			Jumlah Pokdakan Air Tawar yang memperoleh bantuan Pemerintah (Pokdakan)	-	-	-	3.0			4.0	3.0

(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	<b>Persentase Cakupan Pembudidaya Ikan Air Payau yang di berdayakan (%)</b>					<b>100.0</b>	<b>100.0</b>			<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
			Jumlah Dokumen Penyediaan Data Informasi Pembudidayaan Ikan Air Payau Dalam 1 Daerah Kabupaten / Kota (Dokumen)	-	-	-	1.0			10.0	1.0
			Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan (Rekomendasi)	-	-	-	9.0			28.0	9.0
			Jumlah Pembudidaya Ikan Air Payau yang terlatih (Orang)	-	-	-	30.0			-	30.0
			Jumlah Prasarana Pembudidaya Ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota yang diadakan (Paket)	-	-	4.0	-			-	-
			Jumlah Benih Ikan Air Tawar yang diproduksi (ekor)			517,750	-				-
			Jumlah Pokdakan yang memperoleh bantuan (Pokdakan)			20.0	-				-
			Jumlah Pembudidaya ikan air Payau yang terfasilitasi dengan mitra (orang)			-	200.0				200.0
			Jumlah Benih Ikan Air Tawar yang diproduksi (ekor)			-	522,929				522,929

(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			Jumlah Layanan Operasional Unit Pengelolaan Balai Benih Ikan (Unit)	-	-	-	1.0			-	1.0

	<b>Persentase Kelompok Pembudidaya Ikan Air Payau yang di berdayakan dan memperoleh bantuan pemerintah (%)</b>					-	<b>100.0</b>				<b>100.0</b>
	<b>Persentase pemantauan lokasi kesehatan ikan dan lingkungan perikanan (%)</b>					<b>100.0</b>	-			<b>100.0</b>	-
			Jumlah kelompok pembudidaya ikan Air Payau yang terbina dan terfasilitasi (Pokdakan)			-	571.0				571.0
			Jumlah pembudidaya ikan Air Payau yang memperoleh kegiatan pemberdayaan per tahun (Orang)			-	40.0				40.0
			Jumlah Pokdakan Air Payau yang memperoleh bantuan pemerintah (Pokdakan)			-	15.0				15.0
			Jumlah pemantauan lokasi kesehatan ikan dan lingkungan perikanan (kecamatan)			10.0	-				-

(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	<b>Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (Ton)</b>						10,577.0				10,577.0
	<b>Persentase Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pengolah Usaha Pemasaran, pengolahan Hasil Perikanan dan Jumlah Pengolah, Pemasar yang terlatih (%)</b>						100.0				100.0
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan pengolahan Hasil Perikanan Dalam 1 (Satu)daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)				1.0				1.0
			Jumlah Pengolah dan Pemasar yang terlatih (orang)				30.0				30.0
	<b>Persentase Jumlah Pengolah dan Pemasar yang terfasilitasi dengan mitra (%)</b>						100.0				100.0
			Jumlah Jumlah Pengolah dan Pemasar yang terfasilitasi dengan mitra (orang)				5.0				5.0

(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	<b>Persentase Pengolah dan Pemasar terfasilitasi yang memperoleh bantuan pemerintah (%)</b>						100.0				100.0
			Jumlah Kelompok yang terbina dan terfasilitasi (Poklahsar)				73.0				73.0
			Jumlah Kelompok Poklahsar yang memperoleh bantuan pemerintah (Poklahsar)				1.0				1.0

	<b>Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP</b>					<b>B</b>	<b>B</b>			<b>B</b>	<b>B</b>
	<b>Persentase Capaian Program Perangkat Daerah (%)</b>					<b>100.0</b>	<b>100.0</b>			<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
<b>15</b>	<b>Persentase Capaian kegiatan perangkat daerah (%)</b>			-	-	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>			<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
<b>16</b>	<b>Persentase Jumlah Dokumen Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun (%)</b>			-	-	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>			<b>100.0</b>	<b>100.0</b>



(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun (Dokumen)	-	-	5.0	4.0			5.0	4.0
			Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	-	-	4.0	4.0			4.0	4.0
<b>17</b>	<b>Persentase Jumlah Laporan Adminstrasi Keuangan Peringkat Daerah Tepat Waktu (%)</b>			-	-	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>			<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
			Jumlah laporan Gaji dan Tunjangan ASN yang terkoordinasi dan tepat waktu	-	-	14.0	14.0			14.0	14.0
<b>18</b>	<b>Persentase Jumlah Laporan Pelaksanaan Adminitrasi Kepegawaian (%)</b>			-	-	-	<b>100.0</b>			-	<b>100.0</b>
			jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)				2.0				2.0
			Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas ASN (pasang)				-				-
			Jumlah ASN yang Mengikut Bimtek dan Latpim (Orang)	-	-	-	1.0			-	1.0
			Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknis Kantor Sendiri yang terlaksana terkait Pelaksanaan Pengawasan Internal (Kegiatan)	-	-	-	-			-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
19	<b>Persentase Jumlah laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)</b>			-	-	100.0	100.0			100.0	100.0
			Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Jenis)	-	-	3.0	3.0			3.0	3.0
			Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga (Jenis)	-	-	3.0	3.0			3.0	3.0
			Jumlah Bahan Logistik Penyediaan makanan dan minuman ( jenis)	-	-	3.0	3.0			3.0	3.0
			Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan penunjang administrasi perkantoran (jenis)	-	-	2.0	2.0			2.0	2.0
			Jumlah pembayaran media yang menyediakan bahan bacaan (Jenis)	-	-	204.0	-			204.0	-
			Jumlah pembayaran media yang menyediakan bahan bacaan (Paket)				3.0				3.0
			Jumlah Kegiatan rutin koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tupoksi organisasi ke tingkat Nasional, Provinsi (kegiatan)	-	-	87.0	87.0			87.0	87.0

(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
20	<b>Persentase Jumlah Laporan Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan rencana kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)</b>			-	-	-	100.0			-	100.0
			Jumlah Pengadaan Mebeleur (Paket )	-	-	-	5.0			-	5.0
			Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor (Paket)	-	-	-	5.0			-	5.0
21	<b>Persentase Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia (%)</b>			-	-	100.0	100.0			100.0	100.0
			Jumlah rekening Telepon, Air, dan Listrik (Rekening)	-	-	96.0	72.0			72.0	72.0
			Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang dibayarkan (paket)	-	-	33.0	-			33.0	-
			Jumlah tenaga Administrasi yang mendapatkan Jasa Keuangan (Kali)	-	-	432.0	-			432.0	-
			Jumlah tenaga pelayanan umum yang dibayarkan perbulan untuk menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran (orang/bulan)	-	-	-	432.0			-	432.0

(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			Jumlah Realisasi Pembayaran Honorarium bagi Pengelola Keuangan Perangkat Daerah (Bulan)	-	-	-	12.0			-	12.0
<b>22</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara (%)</b>			-	-	<b>100.0</b>	100.0			<b>100.0</b>	100.0
			Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional (Unit)	-	-	7.0	7.0			7.0	7.0
			Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin Gedung Kantor secara rutin/berkala (Unit)			-	33.0			-	33.0
			Jumlah Pemeliharaan / rehabilitasi gedung Kantor (unit)				3.0			-	3.0

Tabel 2. Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2020

No	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	Anggaran yang Telah disetor	Persentase (%)
1	2	3	10(4+7)	11(5+8)	
1	412 02 01- Retribusi Pemakaian Kekayaaan Daerah	43,475,000	44,000,000	44,000,000	101.2
	- Excavator	43,475,000	44,000,000	44,000,000	101.2
2	412 02 02- Retribusi T. Pelelangan	56,525,000	54,750,000	54,750,000	96.9
	- Sewa Kios Nelayan	-	-	-	-
	- Sewa Kantin Nelayan	-	-	-	-
	- Sewa Tangki SPDN	-	-	-	-
	- Jasa Tempat Pelelangan Ikan	56,525,000	54,750,000	54,750,000	96.9
	- Tambat/ Labuh	-	-	-	-
	- Pas Masuk	-	-	-	#DIV/0!
	- Bagi Hasil Penjualan Air Bersih	-	-	-	-
3	412 02 03- Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daearah	25,000,000	26,500,000	26,500,000	106.0
	- Bibit Ikan Nila, Mas, Lele	25,000,000	26,500,000	26,500,000	106.0
4	412 02 05- Retribusi Izin Usaha Perikanan	-	100,000.00	100,000.00	#DIV/0!
	- Luas Tempat Usaha	-	100,000	100,000	#DIV/0!
	Jumlah	125,000,000	125,350,000	125,350,000	100.3



**Tabel 3. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang bersumber dari Dana APBD Kabupaten Bone Tahun 2020**

**Provinsi : Sulawesi Selatan**

**Kabupaten : Bone**

NO.	PROGRAM UTAMA	SASARAN				SATUAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)	REALISASI		FISIK (%)	SUMBER DANA
		URAIAN		INDIKATOR KINERJA					KEU. (Rp)	(%)		
1	2	3		4		5	6	7	8		9	10
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	1	Jumlah Rekening Pembayaran Jasa Telepon, Air dan Listrik (Rekening)	Rekening	96	105,902,061	100,212,862	94.63	100	DAU
		2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang berfungsi (Unit)	Unit	33	10,000,000	10,000,000	100.00	100	DAU
		3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Paket)	Paket	3	2,589,500.0	2,491,000	96.20	100	DAU
		4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	4	Jumlah Aparatur Dinas yang diberikan honor atas pelaksanaan Administrasi Pengelolaan Keuangan (Orang)	Orang	35	123,346,000	122,009,500	98.92	100	DAU
		5	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5	Jumlah Bahan Bacaan (Media)	Media	17	15,000,000	13,650,000	91.00	100	DAU
		6	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam dan Keluar Daerah	6	Jumlah Aparatur Dinas (PNS/Non PNS) yang melaksanakan Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan ke luar Daerah (Kegiatan)	Kegiatan	88	338,797,439	338,795,500	100.00	100	DAU
		7	Pelaksanaan Adminsitrase Perkantoran	7	Kebutuhan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran (Paket)	Paket	3	90,139,000	89,139,000	98.89	100	DAU
2	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	8	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	8	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (Unit)	Unit	6	30,000,000	30,000,000	100.00	100	DAU

			Pengadaan Mebeleur		Jumlah Mebeleur yang diadakan (Unit)	Unit	-	-	-	#DIV/0!	100	DAU
		10	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung/Kantor	10	Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara dan terawat (Unit)	Unit	3	20,565,500	20,565,500	100.00	100	DAU
		11	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	11	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara dan terawat (Unit)	Unit	7	175,546,000	175,214,245	99.81	100	DAU
3	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	12	Pendidikan dan Pelatihan Formal	12	Jumlah Pegawai yang diikuti dalam kegiatan Bimbingan Teknis/Pelatihan (Orang)	Orang	1	3,800,000	3,800,000	100.00	100	DAU
4	Peningkatan Pengembangan Sistem Peaporan Capaian Kinerja	13	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Keuangan yang tersusun (Dokumen)	Dokumen	4	6,200,000	6,185,000	99.76	100	DAU
5	Penunjang Pemerintahan Umum	14	Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	14	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang tersusun (Dokumen )	Dokumen	5	19,650,000	17,898,600	91.09	100	DAU
			Promosi dan Pameran Pembangunan	15	Jumlah Penyelenggaraan promosi Produk Perikanan yang diikuti ( Pameran )	Pameran	-	-	-	#DIV/0!	100	DAU
6	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	15	Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir	16	Jumlah nelayan yang terfasilitasi dengan mitra (Orang)	Orang	30	55,944,300	55,944,300	100.00	100	DAU
		16	Kegiatan Pembinaan Izin Usaha Pembudidaya Ikan	17	Jumlah Penerbitan Izin Usaha Pembudidayaan Ikan yang terfasilitasi (Rekomendasi)	Rekomendasi	0	1,650,000	1,650,000	100.00	100	DAU
		17	Kegiatan Pembinaan Pembudidaya Ikan Skala Kecil	18	Jumlah Penerbitan/Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan dan Pengangkutan Ikan Hidup (Rekomedasi)	Rekomendasi	50	2,750,000	2,750,000	100.00	100	DAU
9	Pengembangan Budidaya Perikanan	23	Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan	20	Jumlah Kelompok Pembudidaya ikan yang memperoleh Pendampingan /Penguatan Kelembagaan (Pokdakan)	Pokdakan	10	35,350,000	35,350,000	100.00	100	DAU



		24	Pembinaan dan Pengembangan Perikanan	21	Jumlah Pokdakan yang mendapat bantuan sarana dan prasarana dan penerapan CBIB (Pokdakan)	Pokdakan	20	1,745,036,000	1,738,207,000	99.61	100	DAK, DAU
		25	Pengembangan UPTD Pembinaan dan Mekanisme Pengelolaan Perikanan Budidaya	22	Jumlah benih air tawar yang diproduksi (ekor)	Ekor	685,000	43,886,000	43,851,000	99.92	100	DAU
		26	Pembinaan dan Pengembangan Kemitraan Usaha Pembudidaya Ikan	23	Jumlah pembudidaya yang terfasilitasi dengan mitra (Orang)	Orang	100	11,550,000	11,550,000	100.00	100	DAU
		27	Pembinaan Sumberdaya Manusia Pembudidaya, Pengolah dan Pemasar Ikan	24	Jumlah Pembudidaya yang mengikuti penguatan SDM (Orang)	Orang	30	2,900,000	2,900,000	100.00	100	DAU
		28	Pembinaan dan Pengembangan Kesehatan dan Lingkungan Perikanan	25	Jumlah Pokdakan yang dibina dan didampingi melalui pemantauan kesehatan dan lingkungan perikanan (Pokdakan)	Pokdakan	5	5,950,000	5,950,000	100.00	100	DAU
10	Pengembangan Perikanan Tangkap	35	Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap	26	Jumlah Nelayan yang terlatih (Orang)	Orang	30	3,725,000	3,725,000	100.00	100	DAU
		36	Pembinaan Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap	27	Jumlah Kelompok Nelayan yang mendapat bantuan (KUB)	KUB	10	1,075,225,000	1,069,277,000	99.45	100	DAK, DAU
		37	Pengembangan UPTD Pembinaan dan Mekanisme Pengelolaan Perikanan Tangkap	28	Jumlah kapal perikanan yang didaratkan di TPI ( Kegiatan )	Kegiatan	1	13,053,500	12,983,500	99.46	100	DAU
		38	Pembinaan, Pendampingan dan Pencatatan Kapal Perikanan	29	Jumlah Penerbitan Pencatatan, Pendaftaran Kapal Perikanan (Kapal)	Kapal	126	3,350,000	3,350,000	100.00	100	DAU
13	Pengembangan Kawasan Budidaya Laut,Air Payau dan Air Tawar	43	Kajian Kawasan Budidaya Air Laut, air payau dan Air Laut	30	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penataan Pengembangan Kawasan Budidaya Baik di air laut, payau maupun air tawar (Dokumen)	Dokumen	1	777,500,000	776,667,000	99.89	100	DAU

				31	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun/diadakan dikawasan Pengembangan Budidaya (Paket)	Paket	6	-	-	-	100	DAU
TOTAL								4,719,405,300	4,694,116,007	99.46	100	

Tabel 3.1 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja Dan Pagu Indikatif Tahun 2022 Dan Prakiraan Maju Tahun 2023

KODE						URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2023	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
3						URUSAN PILIHAN				12.546.183.312				12.546.183.312
3	25					KELAUTAN DAN PERIKANAN				12.546.183.312				12.546.183.312
3	25	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.778.586.553				6.458.387.708
3	25	1	2			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Dokumen Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun (%)		100%	30.000.350				33.000.385
3	25	1	2	1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Kec. T. Riattang	4 Dokumen	17.500.350	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Dokumen	19.250.385
3	25	1	2	6		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun (Dokumen)	Kec. T. Riattang	4 Dokumen	12.500.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Dokumen	13.750.000
3	25	1	2			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Laporan Adminsitrase Keuangan Peran gkat Daerah Tepat Waktu (%)		100%	4.996.001.667			100%	5.495.601.834
3	25	1	2	1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan Gaji dan Tunjangan ASN yang terkoordinasi dan tepat waktu (Laporan)	Kec. T. Riattang	14 Laporan	4.996.001.667	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		14 Laporan	5.495.601.834

3	25	1	2		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Kepegawain (%)</b>		<b>100%</b>	<b>33.268.500</b>			<b>100%</b>	<b>138.537.850</b>
3	25	1	2	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Aparatur	jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	Kec. T. Riattang	2 Unit	11.143.500	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	12.257.850
3	25	1	2	2	Pengadaan Pakaian Dinas Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas ASN (pasang)	Kec. T. Riattang					60 Pasang	33.000.000
3	25	1	2	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan fungsi	Jumlah ASN yang Mengikut Bimtek dan Latpim (Orang)	Kec. T. Riattang	1 Orang	22.125.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Orang	24.337.500
3	25	1	2	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknis Kantor Sendiri yang terlaksana terkait Pelaksanaan Pengawasan Internal (Kegiatan)	Kec. T. Riattang					1 Kegiatan	68.942.500
3	25	1	2		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Jumlah laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)</b>		<b>100%</b>	<b>252.184.240</b>			<b>100%</b>	<b>277.402.664</b>
3	25	1	2	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Jenis)	Kec. T. Riattang	3 Jenis	47.162.150	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Jenis	51.878.365
3	25	1	2	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga (Jenis)	Kec. T. Riattang	3 Paket	3.503.490	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Jenis	3.853.839

3	25	1	2	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Jenis)	Kec. T. Riattang	3 Jenis	16.880.750	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Jenis	18.568.825
3	25	1	2	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan (Jenis)	Kec. T. Riattang	2 Jenis	25.377.850	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Jenis	27.915.635
3	25	1	2	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pembayaran Media yang menyediakan bahan bacaan (Paket)	Kec. T. Riattang	3 Paket	24.000.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Paket	26.400.000
3	25	1	2	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan rutin koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tupoksi organisasi ke tingkat nasional, propinsi (Kegiatan)	Kab. Bone, Propinsi, dan Nasional	87 Kegiatan	135.260.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		87 Kegiatan	148.786.000
3	25	1	2		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Jumlah Laporan Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan rencana kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>Kec. Tanete Riattang</b>	<b>100%</b>	<b>54.970.000</b>			<b>100%</b>	<b>60.467.000</b>
3	25	1	2	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebeleur (Paket)	Kec. Tanete Riattang	5 Paket	29.900.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Paket	32.890.000
3	25	1	2	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor (paket)	Kec. Amali, Kec. tanete riattang, Kec. Tanete Riattang Timur	5 Paket	25.070.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Paket	27.577.000

3	25	1	2		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia (%)</b>		<b>100%</b>	<b>308.913.796</b>			<b>100%</b>	<b>339.805.176</b>
3	25	1	2	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Telepon, Air dan Listrik (Rekening)	Kec. Tanete Riattang	72 Rekening	79.795.396	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		72 Rekening	87.774.336
3	25	1	2	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga administrasi yang mendapatkan jasa keuangan selama setahun							252.030.240
						Jumlah penerimaan jasa tenaga pelayanan umum yang dibayarkan perbulan untuk menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran (orang/bulan)	Kec. Tanete Riattang	36 Orang / Bulan	229.118.400	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		36 Orang / Bulan	
						Jumlah Realisasi Pembayaran Honorarium bagi pengelola keuangan perangkat daerah (laporan)	Kec. Tanete Riattang	12 Laporan		[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	
3	25	1	2		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara (%)</b>		<b>100%</b>	<b>103.248.000</b>			<b>100%</b>	<b>113.572.800</b>
3	25	1	2	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional (Unit)	Kec. Tanete Riattang	7 Unit	73.980.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7 Unit	81.378.000

3	25	1	2	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin Gedung Kantor secara rutin/berkala (Unit)	Kec. Tanete Riattang	33 Unit	9.270.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		33 Unit	10.197.000
3	25	1	2	9	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan / rehabilitasi gedung Kantor (unit)	Kec. Tanete Riattang, Kec. Amali, Kec. Tanete Riattang Timur	3 Unit	19.998.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Unit	21.997.800
3	25	2			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	<b>Produksi Perikanan tangkap (Ton)</b>		<b>55.735,57 Ton</b>	<b>1.185.173.470</b>			<b>59.079,70 Ton</b>	<b>1.303.690.817</b>
3	25	2	2		<b>Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase) Jumlah Nelayan Kecil yang diberdayakan dalam Daerah Kabupaten/ kota (%)</b>		<b>100%</b>	<b>101.300.000</b>			<b>100%</b>	<b>111.430.000</b>
3	25	2	2	1	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan yang terlatih/ dibina (Orang)	10 Kec. Pantai	30 Orang	12.400.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		30 Orang	13.640.000
						Jumlah data dan informasi sumberdaya ikan (Laporan)		1 Laporan				1 Laporan	
3	25	2	2	3	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah nelayan / kelompok nelayan yang terfasilitasi dengan mitra (orang)	27 Kecamatan	160 Orang	88.900.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		170 Orang	97.790.000
						Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	27 Kecamatan	113 RTP				113 RTP	

3	25	2	2		<b>Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)</b>	<b>Persentase Jumlah Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (%)</b>		100%	24.044.470			100%	26.448.917
3	25	2	2	2	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah kegiatan Layanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (kegiatan)	Kec. TR. Timur	1 Kegiatan	24.044.470	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Kegiatan	26.448.917
						Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional (%)		100%				100%	
3	25	2	2		<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah</b>	<b>Persentase Kelompok Nelayan yang memperoleh bantuan pemerintah (%)</b>		100%	1.059.829.000			100%	1.165.811.900
3	25	2	2	3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah kelompok nelayan yang terbina dan terfasilitasi (KUB)	10 Kec. Pantai	252 (KUB)	1.059.829.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum - Dana Alokasi Khusus (DAK)		254 KUB	1.165.811.900
						Jumlah kelompok nelayan yang memperoleh bantuan pemerintah(KUB)	10 Kec. Pantai	4 KUB				4 KUB	
3	25	3			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	<b>Produksi Perikanan Budidaya (Ton)</b>		450.711,19 Ton	1.592.302.977			482.260,98 Ton	1.751.533.275



3	25	3	2		<b>Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</b>	<b>Persentase Cakupan Pembudidaya Ikan Air Tawar yang diberdayakan dalam Daerah Kabupaten/ kota (%)</b>		<b>100%</b>	<b>24.800.000</b>			<b>100%</b>	<b>27.280.000</b>
3	25	3	2	1	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan air tawar (Laporan)	27 Kecamatan	1 Laporan	12.400.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	13.640.000
						Jumlah Pembudidaya Ikan air tawar yang terlatih dan terfasilitasi (Orang)	27 Kecamatan	30 Orang				30 Orang	
3	25	3	2	3	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Pembudidaya Ikan Air Tawar yang terfasilitasi dengan mitra (Orang)	27 Kecamatan	100 orang	12.400.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 orang	13.640.000
3	25	3	2		<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>	<b>Persentase Pembudidaya Ikan Air Tawar yang memperoleh bantuan pemerintah (%)</b>		<b>100%</b>	<b>169.100.000</b>			<b>100%</b>	<b>186.010.000</b>
						<b>Persentase Cakupan Pembudidaya Ikan Air Payau yang diberdayakan</b>		<b>100%</b>	<b>75.871.335</b>			<b>100%</b>	<b>83.458.469</b>
						<b>Persentase Kelompok Pembudidaya Ikan Air Payau yang di berdayakan dan memperoleh bantuan pemerintah (%)</b>		<b>100%</b>	<b>1.322.531.642</b>			<b>100%</b>	<b>1.454.784.806</b>

3	25	3	2	1	Penyediaan Data Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan Data Informasi Pembudidayaan Ikan Air Payau Dalam 1 Daerah Kabupaten /Kota (Dokumen)	27 Kecamatan	1 Dokumen	12.400.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	13.640.000
						Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan (Rekomendasi)	27 Kecamatan	9 Rekomendasi			9 Rekomendasi	
						Jumlah Pembudidaya Ikan Air Payau yang terlatih (Orang)	27 Kecamatan	30 Orang			30 Orang	
3	25	3	2	2	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok pembudidaya ikan Air Payau yang terbina dan terfasilitasi (Pokdakan)	10 Kec. Pantai	571 Pokdakan	1.322.531.642	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum =	573 Pokdakan	1.454.784.806
						Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan per tahun (Orang)	10 Kec. Pantai	40 Orang		Dana Alokasi Khusus (DAK)	40 Orang	
						Jumlah Pokdakan Air Payau yang memperoleh bantuan pemerintah (Pokdakan)	10 Kec. Pantai	15 Pokdakan			15 Pokdakan	

3	25	3	2	3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok pembudidaya ikan Air Tawar yang terbina dan terfasilitasi (Pokdakan)	27 Kecamatan	104 Pokdakan	169.100.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum - Dana Alokasi Khusus	106 Pokdakan	186.010.000
						Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan per tahun	27 Kecamatan	10 Pokdakan			10 Pokdakan	
						Jumlah Pokdakan Air Tawar yang memperoleh bantuan pemerintah (Pokdakan)	27 Kecamatan	3 Pokdakan			3 Pokdakan	
3	25	3	2	5	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya Ikan Air Payau yang terfasilitasi dengan mitra (Orang)	10 Kec. Pantai	200 Orang	12.400.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	200 Orang	13.640.000
3	25	3	2	7	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Benih Ikan Air Tawar yang diproduksi (ekor)	Kec. Amali	522.929 Ekor	51.071.335	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	533.438 Ekor	56.178.469
						Jumlah Layanan Operasional Unit Pengelolaan Balai Benih Ikan (Unit)	Kec. Amali	1 Unit				
3	25	5			<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	<b>Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (Ton)</b>	<b>27 Kecamatan</b>	<b>10.577,02 Ton</b>	<b>182.131.000</b>		<b>10.788,56</b>	<b>200.344.100</b>

3	25	5	2		<b>Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Mikro dan Kecil</b>	<b>Persentase Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pengolah Usaha Pemasaran, pengolahan Hasil Perikanan dan Jumlah Pengolah, Pemasar yang terlatih (%)</b>	<b>27 Kecamatan</b>	<b>100%</b>	<b>12.400.000</b>			<b>100%</b>	<b>13.640.000</b>
3	25	5	2	1	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan pengolahan Hasil Perikanan Dalam 1 (Satu)daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan pengolahan Hasil Perikanan Dalam 1 (Satu)daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	27 Kecamatan	1 Dokumen	12.400.000	DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	13.640.000
						Jumlah Pengolah dan Pemasar yang terlatih (orang)	27 Kecamatan	30 Orang				30 Orang	
3	25	5	2		<b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</b>	<b>Persentase Jumlah Pengolah dan Pemasar yang terfasilitasi dengan mitra (%)</b>	<b>27 Kecamatan</b>	<b>100%</b>	<b>12.400.000</b>			<b>100%</b>	<b>13.640.000</b>
3	25	5	2	1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Pengolah dan Pemasar yang terfasilitasi dengan mitra (orang)	27 Kecamatan	5 Orang	12.400.000	DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Orang	13.640.000
3	25	5	2		<b>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu)Daerah Kabupaten Kota</b>	<b>Persentase Pengolah dan Pemasar terfasilitasi yang memperoleh bantuan pemerintah (%)</b>	<b>27 Kecamatan</b>	<b>100%</b>	<b>157.331.000</b>			<b>100%</b>	<b>173.064.100</b>
3	25	5	2	1	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan kecil	Jumlah Kelompok yang terbina dan terfasilitasi (Poklachsar)	27 Kecamatan	73 Poklachsar	157.331.000	DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana		75 Poklachsar	173.064.100

					dalam 1 ( Satu) Daerah Kabupaten/Kota					Dana Alokasi Khusus (DAK)			
						Jumlah Kelompok Poklahsar yang memperoleh bantuan pemerintah (Poklahsar)	27 Kecamatan	1 Poklahsar				1 Poklahsar	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bone Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						8,738,194,000		9,190,868,130						
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	5,778,612,798						100 Persen	6,969,858,130	
3	25	01	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Dokumen		Dokumen	9 Dokumen	30,000,350						9 Dokumen	96,800,000	
3	25	01	2.0 1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang tersusun ( Renja, Renstra, RKA,DP{A dan DPPA )				5 Dokumen	17,500,350	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan untuk mendukung pelayanan publik yang berkualitas	ASN Diskan	5 Dokumen	48,400,000	Dinas Perikanan
3	25	01	2.0 1	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Kinerja SKPD yang tersusun ( Laporan Tahunan,LAKIP,LPPD,Laporan Keuangan )				4 Dokumen	12,500,000	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan untuk mendukung pelayanan publik yang berkualitas	ASN Diskan	4 Dokumen	48,400,000	Dinas Perikanan
3	25	01	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu	Laporan		Laporan	12 Laporan	4,996,001,812						12 Laporan	5,384,155,266	
3	25	01	2.0 2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Gaji dan Tunjangan ASN yang terkoordinasi dan Tepat Waktu				12 Laporan	4,996,001,812	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan untuk mendukung pelayanan publik yang berkualitas	ASN Diskan	12 Laporan	5,384,155,266	Dinas Perikanan
3	25	01	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	Laporan		Laporan	66 Laporan	33,268,500						66 Laporan	47,300,000	
3	25	01	2.0 5	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana disiplin Pegawai				2 unit	11,143,500	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan untuk mendukung pelayanan publik yang berkualitas	Aparatur Sipil Negara Dinas Perikanan	2 unit	19,800,000	Dinas Perikanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bone Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek dan Latpim				1 orang	22,125,000	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan untuk mendukung pelayanan publik yang berkualitas	Aparatur Sipil Negara Dinas Perikanan	1 orang	27,500,000	Dinas Perikanan
3	25	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	6 Laporan	252,210,340						6 Laporan	471,432,796	
3	25	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor				3 Jenis	47,162,150	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan untuk mendukung pelayanan publik yang berkualitas	ASN Diskan	3 Jenis	60,500,000	Dinas Perikanan
3	25	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga				3 Jenis	3,503,490	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan untuk mendukung pelayanan publik yang berkualitas	ASN Diskan	3 Jenis	6,050,000	Dinas Perikanan
3	25	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Penyediaan Makanan dan Minuman				3 Jenis	16,890,750	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan untuk mendukung pelayanan publik yang berkualitas	ASN Diskan	3 Jenis	30,250,000	Dinas Perikanan
3	25	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penunjang Administrasi Perkantora				2 Jenis	25,393,950	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan untuk mendukung pelayanan publik yang berkualitas	ASN Diskan	2 Jenis	30,250,000	Dinas Perikanan
3	25	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pembayaran Media yang menyediakan Bahan Bacaan				3 jeni3	24,000,000	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan untuk mendukung pelayanan publik yang berkualitas	ASN Diskan	3 jeni3	30,250,000	Dinas Perikanan
3	25	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Rutin Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tupoksi Organisasi ke Tingkat Nasional, Propinsi yang diikuti				87 Kegiatan	135,260,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan untuk mendukung pelayanan publik yang berkualitas	ASN Diskan	87 Kegiatan	314,132,796	Dinas Perikanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bone Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
														Nasional	Daerah				
3	25	01	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan rencana kebutuhan Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Laporan		Laporan	2 Laporan	54,970,000					2 Laporan	220,000,000		
3	25	01	2.0 7	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebeler ( Unit )				56 unit	29,900,000	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan untuk mendukung pelayanan publik yang berkualitas	ASN Diskan	56 unit	77,000,000	Dinas Perikanan
3	25	01	2.0 7	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor				10 Buah	25,070,000	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan untuk mendukung pelayanan publik yang berkualitas	ASN Diskan	10 Buah	143,000,000	Dinas Perikanan
3	25	01	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	Laporan		Laporan	3 Laporan	308,913,796						3 Laporan	470,229,000	
3	25	01	2.0 8	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Telpon, Air dan Listrik				72 Rekening	79,795,396	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan untuk mendukung pelayanan publik yang berkualitas	ASN Diskan	72 Rekening	129,229,000	Dinas Perikanan
3	25	01	2.0 8	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Realisasi Pembayaran Honorarium Bagi Pengelola Keuangan Perangkat Daerah  Jumlah Tenaga Pelayanan Umum yang dibayarkan perbulan untuk menunjang pelaksanaan Administrasi Perkantoran				12 Bulan 36 orang/bulan	229,118,400	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan untuk mendukung pelayanan publik yang berkualitas	ASN Diskan	12 Bulan 36 orang/bulan	341,000,000	Dinas Perikanan
3	25	01	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	%		%	100 %	103,248,000						100 %	279,941,068	



Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bone Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	01	2.0 9	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Oprerasiaonal				7 unit	73,980,000	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan untuk mendukung pelayanan publik yang berkualitas	ASN Diskan	7 unit	208,441,068	Dinas Perikanan
3	25	01	2.0 9	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara secara Rutin/berkala				33 unit	9,270,000	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan untuk mendukung pelayanan publik yang berkualitas	ASN Diskan	33 unit	22,000,000	Dinas Perikanan
3	25	01	2.0 9	09	Pemeliharaan/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor				3 unit	19,998,000	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan untuk mendukung pelayanan publik yang berkualitas	ASN Diskan	3 unit	49,500,000	Dinas Perikanan
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	590797 Ton		49604459 Ton	55735,57 Ton	1,185,163,470						55735,57 Ton	406,010,000	
3	25	03	2.0 1		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kelompok Nelayan yang memperoleh bantuan pemerintah	KUB		KUB	6 KUB	1,153,219,000						6 KUB	250,250,000	
3	25	03	2.0 1	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Kelompok Nelayan yang memperoleh Bantuan Pemerintah  Jumlah Kelompok Nelayan yang Terbina dan Terfasilitasi				4 KUB 252 KUB	1,153,219,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum  Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik  Dana Insentif Daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pengembangan ekonomi daerah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat	Nelayan	4 KUB 252 KUB	250,250,000	Dinas Perikanan
3	25	03	2.0 2		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Nelayan Kecil yang diberdayakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	orang		orang	190 orang	22,900,000						190 orang	124,300,000	
3	25	03	2.0 2	01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Data dan Informasi Sumberdaya Ikan  Jumlah Nelayan yang Terlatih				1 Dokumen 30 orang	5,700,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pengembangan ekonomi daerah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat	Nelayan	1 Dokumen 30 orang	36,300,000	Dinas Perikanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bone Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	03	2.0 2	03	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Nelayan/kelompok yang terfasilitasi dengan Mitra				160 orang	17,200,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pengembangan ekonomi daerah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat	Nelayan	160 orang	88,000,000	Dinas Perikanan
3	25	03	2.0 3		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Unit Layanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan	Unit		Unit	1 Unit	9,044,470						1 Unit	31,460,000	
3	25	03	2.0 3	02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Unit Layanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan				1 unit	9,044,470	Kab. Bone, Tanete Riattang Timur, Lonrae	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pengembangan ekonomi daerah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat	UPT TPI Lonrae	1 unit	31,460,000	Dinas Perikanan
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya	482,26 Ton		39366861 Ton	450711,19 Ton	1,592,286,732						450711,19 Ton	1,551,000,000	
3	25	04	2.0 2		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Pembudidaya Ikan Air Tawar yang diberdayakan	orang		orang	130 orang	11,400,000						130 orang	77,000,000	
3	25	04	2.0 2	01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Data Informasi Usaha Perikanan dibidang pembudidayaan Ikan air tawar Jumlah Pembudidayaan Ikan Air Tawar yang terlatih				1 Dokumen 30 orang	5,700,000	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pengembangan ekonomi daerah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat	Pembudidaya Ikan	1 Dokumen 30 orang	38,500,000	Dinas Perikanan
3	25	04	2.0 2	03	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Pembudidaya Ikan Air Tawar yang terfasilitasi dengan mitra				100 orang	5,700,000	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pengembangan ekonomi daerah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat	Pembudidaya Ikan	100 orang	38,500,000	Dinas Perikanan
3	25	04	2.0 4		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Pembudidaya Ikan Air Payau yang diberdayakan	orang		orang	375 orang	1,580,886,732						375 orang	1,474,000,000	
3	25	04	2.0 4	01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan Data Informasi Pembudidayaan Ikan Air Payau dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pembudidaya Ikan Air Payau yang Terlatih				1 Dokumen 30 Orang	5,700,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pengembangan ekonomi daerah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat	Pembudidaya Ikan	1 Dokumen 30 Orang	33,000,000	Dinas Perikanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Bone  
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	04	2.0 4	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Air Payau yang terbina dan terfasilitasi  Jumlah pokdakan Air payau yang memperoleh Bantuan Pemerintah				571 Pokdakan 15 Pokdakan	1,532,715,397	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum  Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik  Dana Insentif Daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pengembangan ekonomi daerah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat	Pembudidaya Ikan	571 Pokdakan 15 Pokdakan	1,012,000,000	Dinas Perikanan
3	25	04	2.0 4	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pokdakan Air Tawar yang memperoleh Bantuan Pemerintah  Jumlah Pokdaka pembudidaya ikan air tawar yang terbina dan terfasilitasi				5 Pokdakan 104 Pokdakan	5,700,000	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum  Dana Insentif Daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pengembangan ekonomi daerah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat	Pembudidaya Ikan	5 Pokdakan 104 Pokdakan	330,000,000	Dinas Perikanan
3	25	04	2.0 4	05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya Ikan Air Payau yang terfasilitasi dengan Mitra				200 Orang	5,700,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pengembangan ekonomi daerah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat	Pembudidaya Ikan	200 Orang	44,000,000	Dinas Perikanan
3	25	04	2.0 4	07	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Benih Ikan Air Tawar yang diproduksi  Jumlah Layanan Operasional Unit Pengelolaan Balai Benih Ikan				522929 Ekor 1 Unit	31,071,335	Kab. Bone, Amali, Mampotu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pengembangan ekonomi daerah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat	Pembudidaya Ikan	522929 Ekor 1 Unit	55,000,000	Dinas Perikanan
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	10,788.58 Ton		- Ton	10577,02 Ton	182,131,000						10577,02 Ton	264,000,000	
3	25	06	2.0 1		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Pengolah dan Pemasar yang terlatih	Orang		Orang	30 Orang	5,700,000						30 Orang	38,500,000	
3	25	06	2.0 1	01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota  Jumlah Pengolah dan Pemasar yang terlatih				1 Dokumen 30 orang	5,700,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pengembangan ekonomi daerah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat	Pengolah dan Pemasar	1 Dokumen 30 orang	38,500,000	Dinas Perikanan
3	25	06	2.0 2		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase Jumlah Pengolah dan Pemasar yang terfasilitasi dengan mitra	Persen		Persen	100 Persen	5,700,000						100 Persen	38,500,000	

## Tahun 2022